

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Profil Kota Bandar Lampung

1. Letak Geografis

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Propinsi Lampung, selain merupakan pusat kegiatan Pemerintahan, Sosial Politik, Pendidikan dan Kebudayaan, juga merupakan pusat kegiatan perekonomian, yang secara ekonomis menguntungkan pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung, yaitu sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Dengan letaknya yang strategis, di mana Propinsi Lampung sebagai daerah lalu lintas dan transit berbagai kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Hal ini menjadikan Kota Bandar Lampung berkembang cukup pesat dalam wilayah Propinsi Lampung. Luas wilayah Kota Bandar Lampung 197,22 km² yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, Kota Bandar Lampung saat ini menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan.

Tabel 1. Nama Kecamatan, Ibukota, Jumlah Kelurahan, dan Luas Wilayah Kota Bandar Lampung per-Kecamatan (km²)

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Teluk Betung Barat	Bakung	6	8,89
2	Teluk Betung Selatan	Sukaraja	10	7,30
3	Panjang	Panjang Selatan	7	21,16
4	Tanjung Karang Timur	Kota Baru	10	6,15
5	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	5	9,37
6	Tanjung Karang Pusat	Palapa	7	5,31
7	Tanjung Karang Barat	Gedong Air	6	15,14
8	Kemiling	Sumberejo	6	25,02
9	Kedaton	Kampung Baru	7	5,26
10	Rajabasa	Rajabasa	4	13,02
11	Tanjung Senang	Tanjung Senang	4	11,63
12	Sukarame	Sukarame	6	14,75
13	Sukabumi	Sukabumi	6	11,64
14	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	6	5,62
15	Wayhalim	Wayhalim	6	2,12
16	Langkapura	Langkapura	5	2,63
17	Enggal	Enggal	6	3,00
18	Kedamaian	Kedamaian	7	14,18
19	Teluk Betung Timur	Teluk betung Timur	6	12,10
20	Bumi Waras	Bumi Waras	6	2,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2013

B. Profil Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

1. Latar belakang/Riwayat Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Pada awalnya Dinas Pendapatan Provinsi Lampung bernama “Bagian Pajak/ Penghasilan Daerah Tingkat I Lampung. Waktu pembentukannya bersamaan dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Lampung pada bulan Maret tahun 1964. Pada tahun 1968 Bagian Pajak/ Penghasilan Daerah Tk.I Lampung statusnya ditingkatkan menjadi “Biro” Penghasila Daerah

Tingkat I Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. G/193/VIII/TH/1969, Biro Penghasilan Daerah Tk.I Lampung dihapus dan diubah menjadi Bagian Penghasilan Daerah yang secara struktural menjadi bagian dari Biro Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung. Dengan Surat Keputusan Gubernur No. Des/ 0254/B.VII/HK/1991, maka dibentuklah “Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung”. Selanjutnya, dengan Surat Keputusan Gubernur No. G/163/DP/HK/1972, tanggal 9 November 1972, maka dibentuklah Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung sebagai Dinas Daerah Tingkat I yang berdiri otonom dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. G/102/B.II/HK/80 tanggal 21 Mei 1980 nama Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung diubah menjadi “Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 yang kemudian diralat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/14/23 tanggal 24 Juni 1978, nomenklatur susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi di seluruh Indonesia menjadi seragam. Untuk Provinsi Lampung nomenklatur Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung No. : 14 Tahun 1976. Sejalan dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1999, maka pada tahun 2000 Pemerintah Daerah melakukan penataan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 17 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung dan Keputusan Gubernur Lampung No.: 61 Tahun 2001 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Provinsi Lampung, maka nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan

berubah dari semula bernama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung menjadi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

Kemudian sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pada tahun 2007 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Daerah Lampung Nomo 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; Bagian XVIII. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka pada tahun 2010 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Lampung mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Bagian VIII.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung; Bagian ke XVIII tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah; disebutkan:

1. Dinas Pendapatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah provinsi di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, dan penetapan standar/pedoman;
 - b. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Koordinasi dan
 - c. Pelayanan administratif.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Dinas Pendapatan Provinsi Lampung adalah merupakan unsur Pemerintah Provinsi yang antara lain diberi kewenangan sebagai pengelola pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus sebagai Koordinator di bidang Pendapatan Daerah. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pajak;
- d. Bidang Retribusi dan Penerimaan Lain-lain;
- e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung terdiri dari 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD Wilayah I Bandar Lampung, UPTD Wilayah II Metro, UPTD Wilayah III Gunung Sugih, UPTD Wilayah IV Kotabumi dan UPTD Wilayah V Pringsewu. Selain membawahi 5 UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Lampung juga memiliki 19 Kantor Bersama Samsat sebagai berikut:

Tabel 2
Kantor Bersama Samsat di Provinsi Lampung Tahun 2013

Nama Kantor	Tahun Diresmikan	Status Kantor
Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung	1979	-
Kantor Bersama Samsat Metro	1984	PENUH/ MANDIRI
Kantor Bersama Samsat Kotabumi	1984	PENUH/ MANDIRI

Kantor Bersama Samsat Kalianda	1993	PENUH/ MANDIRI
Kantor Bersama Samsat Liwa	1996	PENUH/ MANDIRI
Kantor Bersama Samsat Kota Agung	1999	PENUH/ MANDIRI
Kantor Bersama Samsat Menggala	1999	PEMBANTU
Kantor Bersama Samsat Gunung Sugih	2000	PENUH/ MANDIRI
Kantor Bersama Samsat Sukadana	2000	PENUH/ MANDIRI
Kantor Bersama Samsat Belambangan Umpu	2000	PENUH/ MANDIRI
Kantor Bersama Samsat Rajabasa	2003	PENUH/ MANDIRI
Kantor Samsat Mall Chandra Bandar Lampung	2009	PEMBANTU
Kantor Samsat Pringsewu	2009	PEMBANTU
Kantor Samsat Mall Millenium Natar	2010	PEMBANTU
Kantor Samsat Mall Kartini Bandar Lampung	2010	PEMBANTU
Kantor Samsat Kontainer Sukaraja	2010	PEMBANTU
Kantor Bersama Samsat Mesuji	2011	PEMBANTU
Kantor Bersama Samsat Tuba Barat	2011	PEMBANTU
Kantor Bersama Samsat Pesawaran	2011	PEMBANTU

Sumber : Dispenda Provinsi Lampung

3. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010-2014

3.1 Visi Pemerintah Provinsi Lampung

Visi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 – 2014 adalah : “Lampung unggul dan berdaya saing berbasis Ekonomi Kerakyatan”.

3.2 Visi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Mengacu kepada Visi Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2010 – 2014, maka Visi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung tahun 2010 – 2014 adalah : “Pengelola pendapatan daerah yang profesional dan bertanggung jawab”.

3.3 Misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendapatan Provinsi Lampung merumuskan 3 (tiga) Misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, yaitu :

- A. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkuantitas maksimum kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang efektif.
- B. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber day dan teknologi secara efisien, efektif serta berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- C. Melaksanakan koordinasi yang optimal dalam menciptakan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

3.4. Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, maka ditetapkan Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan sebagai berikut:

Tujuan :

- A. Peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam proses pengelolaan Pendapatan Daerah.
- B. Tersedianya teknologi dan aparatur pengelola pendapatan daerah yang profesional.
- C. Peningkatan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Sasaran :

- 1. Peningkatan pelayanan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari tahun sebelumnya.
- B. Peningkatan sumber daya teknologi dan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dari tahun tahun sebelumnya.
- C. Meningkatkan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan :

- A. Penyediaan sarana dan prasarana yang optimal untuk mendukung produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan.
- B. Penyediaan perangkat hukum yang taat azas dalam proses pengelolaan pendapatan daerah dan pelayanan.
- C. Penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah.
- D. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal untuk mendukung produktifitas pendapatan daerah dan pelayanan.

E. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka menciptakan sinergisitas pengelolaan pendapatan daerah.

Mencermati berbagai hal di atas, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung menjelaskan bahwa strategi kebijakan pengelolaan pendapatan di Provinsi Lampung diarahkan pada :

A. Evaluasi/ penyesuaian, penyusunan, serta sosialisasi produk-produk hukum pendapatan daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

B. Revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan khususnya UPTD Pajak di lingkup Dispenda Provinsi Lampung.

C. Peningkatan sarana dan prasarana Kantor Bersama Samsat eksisting dalam upaya dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor.

D. Peningkatan akses pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor melalui samsat Link dan pembentukan kantor-kantor Samsat Pembantu pada lokasi-lokasi strategis maupun pengembangan keberadaan Samsat Keliling.

E. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola Pajak Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah.

F. Optimalisasi proses-proses inspeksi dan pengujian kepatuhan pajak dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah.

G. Rekonsiliasi data terkait dengan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, termasuk penyusunan Dana Bagi Hasil baik dari Pemerintah Pusat maupun kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota.

H. Optimalisasi fungsi-fungsi pengawasan dan pembinaan baik dalam lingkup internal maupun eksternal terkait pengelolaan pendapatan daerah pada bidang administrasi, keuangan, dan kelembagaan/ personal.

I. Optimalisasi koordinasi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

J. Upaya untuk menggali kontribusi dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan PAD.